

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Policy Output

Implementasi revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang telah dilaksanakan kurang baik. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum dapat teratasi dengan cukup maksimal. Kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi program revitalisasi Kota Lama sebagai berikut. Dalam implementasinya kemudahan masyarakat dalam merasakan dampak dari program ini sudah mampu menunjukkan keberhasilan program di kawasan Kota Lama. Program revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang telah berhasil menjawab kebutuhan awal masyarakat, khususnya dalam hal pelestarian warisan budaya dan penanggulangan banjir. Penataan ulang infrastruktur, perbaikan saluran air, peningkatan pencahayaan, penambahan street furniture, serta pembangunan zona pejalan kaki telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kenyamanan dan keamanan kawasan tersebut. Lebih dari itu, revitalisasi ini tidak hanya menghidupkan kembali fungsi sejarah kawasan, tetapi juga membuka peluang baru di sektor ekonomi dan sosial, seperti tumbuhnya pelaku UMKM, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, serta penguatan citra Kota Semarang sebagai kota budaya yang layak dikunjungi.

Implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek **akses** informasi, **cakupan** pelibatan masyarakat, **ketepatan layanan**, serta **akuntabilitas** dan **kesesuaian program dengan kebutuhan yang dinamis**. Masih ada resistensi awal dari masyarakat karena minimnya sosialisasi dan pemahaman terhadap program, serta adanya sikap skeptis terhadap manfaat revitalisasi. Hal ini menandakan bahwa komunikasi

publik dan strategi pelibatan masyarakat perlu ditingkatkan agar program bisa diterima lebih luas dan merata.

Dari sisi **cakupan**, pemerintah telah berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat di kawasan Kota Lama, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif. Dalam aspek **ketepatan layanan**, pelayanan publik yang diberikan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam edukasi dan pemeliharaan berkelanjutan. **Akuntabilitas** pelaksanaan program ditunjukkan melalui transparansi dan evaluasi rutin, yang mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Terakhir, **kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat** memperlihatkan bahwa meskipun program telah dirancang berdasarkan kebutuhan awal, kebutuhan baru seperti ruang publik yang nyaman dan peluang ekonomi tambahan masih belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa proses implementasi program ini diwarnai oleh sejumlah faktor pendorong dan penghambat yang saling memengaruhi.

4.1.2 Faktor Pendorong

Faktor-faktor pendorong keberhasilan implementasi program meliputi:

1. **Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan** yang tinggi dalam menyelesaikan program secara konsisten dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

2. **Ketersediaan sumber daya** yang memadai, baik dari aspek tenaga kerja maupun material, serta keterlibatan kontraktor BUMN yang profesional.
3. **Struktur birokrasi dan keberadaan SOP** yang jelas, yang menjadi pedoman pelaksanaan program serta mendukung akuntabilitas dan efektivitas kerja lintas instansi.

4.1.3 Faktor Penghambat

Sementara itu, **faktor-faktor penghambat** yang ditemukan mencakup:

1. **Komunikasi yang belum sepenuhnya optimal**, khususnya dalam menjangkau masyarakat secara luas dan menciptakan ruang dialog yang partisipatif.
2. **Sikap skeptis sebagian masyarakat** terhadap program, yang menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan publik.
3. **Kesulitan dalam mengidentifikasi dan menghubungi pemilik bangunan**, yang memperlambat proses revitalisasi di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi Kota Lama Semarang telah memberikan dampak positif baik secara fisik maupun sosial, namun untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, perlu adanya penguatan dalam aspek partisipasi masyarakat, penyempurnaan kebijakan, serta komitmen terhadap perawatan dan pengembangan kawasan secara holistik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program revitalisasi di kawasan Kota Lama Semarang, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan efektivitas program dan memastikan keberlanjutannya. Berdasarkan temuan mengenai faktor-faktor penghambat implementasi program revitalisasi Kota

Lama, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas program ke depannya.

Pertama, pemerintah bersama stakeholder terkait perlu meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan sebaiknya lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik, mengurangi sikap skeptis, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap program revitalisasi. Kegiatan sosialisasi dapat diwujudkan dalam bentuk diskusi publik, forum warga, penyuluhan, serta pemanfaatan media digital dan lokal sebagai sarana penyebaran informasi.

Kedua, perlu dibentuk forum koordinasi multi-stakeholder yang bersifat tetap dan inklusif. Forum ini hendaknya melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, komunitas lokal, akademisi, serta organisasi non-pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan visi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mencegah tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat proses revitalisasi. Forum ini juga diharapkan mampu menjadi wadah untuk menyelesaikan potensi konflik dan mempercepat pengambilan keputusan secara kolektif.

Ketiga, dalam rangka mengatasi kendala administratif terkait kepemilikan bangunan, pemerintah daerah disarankan untuk membentuk tim khusus yang fokus pada pendataan dan penelusuran legalitas bangunan. Proses ini harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik, dengan melibatkan instansi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kantor pertanahan setempat, serta para ahli hukum pertanahan. Penggunaan teknologi informasi seperti

sistem informasi geografis dan database kepemilikan juga sangat dianjurkan untuk mendukung akurasi data.